

**PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PERSEPSI
MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT : STUDI DI KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG
JAWA TIMUR**



PUBLIKASI ILMIAH

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Geografi
Fakultas Geografi**

Oleh:

NURUL HIDAYANI

E 100 150 210

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PERSEPSI
MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : STUDI DI KECAMATAN
NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG JAWA TIMUR**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NURUL HIDAYANI

E 100 150 210

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. M. Musiyam, M.TP

NIK: 574

**HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI**

**PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP PERSEPSI
MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT : STUDI DI KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG
JAWA TIMUR**

**OLEH
NURUL HIDAYANI
E100150210**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Geografi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, tanggal : Jumat, 14 Oktober 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Muhammad Musiyam, MTP
(Ketua Desan Penguji)
2. Drs. Yuli Priyana, MSi
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Choirul Amin, S.Si. MM
(Anggota II Dewan Penguji)

Tanda Tangan

()
()
()



Surakarta, 22 Oktober 2016

Dekan

Drs. H. Priyono, M.Si

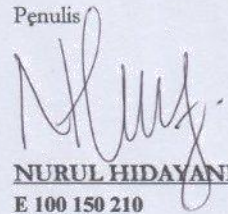
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Oktober 2016

Penulis



NURUL HIDAYANI
E 100 150 210

Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat : Studi di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Jawa Timur

Nurul Hidayani¹, Musiyam²

¹Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : ndhidayani@gmail.com

INTISARI

Kecamatan Ngusikan merupakan kecamatan baru, yaitu merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2000. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; 2) Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap perkembangan desa.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Mojodanu dan Desa Ngampel sebagai desa sampel yang berjumlah 91 responden dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan kuisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86,6% responden menyatakan tingkat pelayanan publik setelah pemekaran meningkat dan 13,4% responden menyatakan menurun. 78% responden menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran meningkat sedangkan 22% responden menyatakan menurun. Desa Ngampel dengan jumlah responden 39 orang, 71,8% diantaranya menyatakan perkembangan desa meningkat setelah pemekaran dan 28,2% responden menyatakan menurun. Desa Mojodanu dengan jumlah responden 52 orang, 86,5% diantaranya menyatakan perkembangan desa meningkat setelah pemekaran kecamatan dan 13,5% responden menyatakan menurun.

Kata Kunci : Pemekaran Kecamatan, kesejahteraan, pelayanan publik, persepsi

Effect of Expansion Area for Public Perception About Public Service and Social Welfare: Study in Ngusikan District Jombang East Java

Nurul Hidayani¹, Musiyam²

¹Student of Geography Faculty Muhammadiyah University of Surakarta

²Lecture of Geography Faculty Muhammadiyah University of Surakarta

Email : ndhidayani@gmail.com

ABSTRACT

District of Ngusikan a new sub-district, which is a division of the District Kudu based Jombang District Regulation No. 15 of 2000. The purpose of this study were: 1) to analyze the effect of splitting districts on public perception of public services and social welfare; 2) to analyze the effect of splitting districts against public perceptions of rural development.

The method used is descriptive analysis. The population in this research that the villagers and village Mojodanu Ngampel as rural sample of 91 respondents with data collection techniques used are observation, documentation, and questionnaire.

The results showed that 86.6% of respondents said the level of public services after the separation increases and decreases of 13.4% of respondents stated. 78% of respondents stated that the level of social welfare after separation increased, while 22% of respondents stated decrease. Ngampel village with a number of respondents 39 people, 71.8% of them declared rural development increased after the enlargement, and 28.2% said declines. Mojodanu village with a number of respondents 52 people, 86.5% of them declared rural development increased after splitting districts and 13.5% of respondents stated decrease.

Keywords: *Expansion of the District, social welfare, public services, perception*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat propinsi, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa. Salah satunya yaitu pemekaran kecamatan yang terjadi di Jawa Timur, Kabupaten Jombang yaitu di Kecamatan Ngusikan. Kecamatan Ngusikan merupakan kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2000 yang mengalami pemekaran pada tahun 2000 namun mulai diresmikan pada tahun 2001. Sebelum mengalami pemekaran, Kecamatan Ngusikan awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Jawa Timur. Kecamatan Ngusikan mengalami pemekaran karena telah memenuhi syarat pembentukan daerah otonom yang diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 yaitu berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan berdasarkan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terbentuknya otonom daerah (Jedawi, 2009).

Kecamatan Ngusikan dengan luas wilayah 27,14 km² sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian yaitu 66,78% dari luas kecamatan, kemudian permukiman 19,32% dari luas kecamatan, hutan dengan luas 8,89%, tegalan 4,86%, dan lainnya 0,15%. Jenis pertanian yang ada di Kecamatan Ngusikan yaitu pertanian tembakau dengan hasil jumlah produksi 433.58 ton, kemudian pertanian kedelai dengan jumlah produksi rata-rata 19,30 kw/Ha, pertanian kacang tanah dengan hasil produksi rata-rata 17,00 kw/Ha, pertanian jagung dengan hasil produksi rata-rata 61,66 kw/Ha, dan pertanian padi dengan hasil produksi rata-rata 70,78 kw/Ha. Selain itu, terdapat perkebunan tebu dengan hasil produksi rata-rata 34,047 kw/Ha. Selain hasil pertanian dan perkebunan, Kecamatan Ngusikan juga memiliki pendapatan dari sektor peternakan skala besar dan kecil yaitu peternakan sapi dengan jumlah ternak 3.471 ekor yang tersebar diseluruh desa, dan peternakan dalam skala kecil yaitu peternakan kambing dan domba dengan masing-masing berjumlah 1.131 ekor dan 1.271 ekor dan tersebar di seluruh desa. Kecamatan Ngusikan memiliki beberapa industri kecil yang terletak di Desa Ketapang Kuning dan Desa Ngampel dengan jumlah masing-masing 28 dan 2 industri, sedangkan industri kerajinan rumah tangga tersebar merata di seluruh desa kecuali desa Sumber Nongko dengan jumlah keseluruhan 798 buah industri (Ngusikan dalam Angka 2015). Keadaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besar ini merupakan salah satu pertimbangan sehingga terjadinya pemekaran kecamatan yang awalnya merupakan Kecamatan Kudu sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Ngusikan. Berdasarkan latar

belakang diatas peneliti mengambil judul “**Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat : Studi di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Jawa Timur**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang perkembangan desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah

1. Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang perkembangan desa

2. METODE PENELITIAN

Metode penentuan daerah sampel yaitu menggunakan *proportional area sampling* sehingga setiap daerah sampel memiliki jumlah sampel yang berbeda berdasarkan jumlah kepala keluarga di desa tersebut. Pemilihan sampel atau responden dilakukan menggunakan metode *stratified sampling* yaitu berdasarkan tingkat pendidikan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk mengetahui perbedaan persepsi setiap responden untuk mengetahui pengaruh pemekaran kecamatan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan

2.1. Populasi atau Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu penduduk Desa Ngampel dan Desa Mojodanu dengan jumlah populasi 987 orang. Penduduk Kecamatan Ngusikan sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

2.2. Penentuan Daerah Sampel

Penentuan daerah sampel berdasarkan perbedaan karakteristik setiap desa. Perbedaan karakteristik yang digunakan yaitu perbedaan luasan sawah yang dibagi menjadi 2 zona, yaitu desa dengan luas sawah >100 Ha dan desa dengan luas sawah <100 Ha. Desa Ngampel merupakan desa dengan luas panen bersih padi terendah dari desa-desa yang memiliki luas lahan sawah >100 Ha yaitu 65 Ha sehingga produksi padi menjadi rendah pula yaitu 411 ton. Desa Mojodanu juga merupakan desa dengan luas panen bersih padi terendah dari desa-desa dengan luas lahan sawah <100 Ha yaitu 26 Ha dengan produksi padi terendah pula yaitu 161 ton (Ngusikan dalam angka 2015).

2.3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan jumlah sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin yaitu;

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

n = ukuran sampel

N = 987 (populasi)

e = 10%

Perhitungan

$$\begin{aligned} N &= \frac{987}{1 + (987 \times (0.10^2))} \\ &= 91 \end{aligned}$$

Desa Ngampel

$$\begin{aligned} N &= \frac{428}{987} \times 91 \\ &= 39 \end{aligned}$$

Desa Mojodanu

$$\begin{aligned} N &= \frac{559}{987} \times 91 \\ &= 52 \end{aligned}$$

Desa Ngampel merupakan desa dengan luas panen bersih padi terendah dari desa-desa yang memiliki luas lahan sawah >100 Ha yaitu 65 Ha sehingga produksi padi menjadi rendah pula yaitu 411 ton. Desa Mojodanu juga merupakan desa dengan luas panen bersih padi terendah dari desa-desa dengan luas lahan sawah <100 Ha yaitu 26 Ha dengan produksi padi terendah pula yaitu 161 ton (Ngusikan dalam angka 2015).

2.4. Metode Pengumpulan Data

2.4.1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada responden kemudian diisi berdasarkan pertanyaan yang ada.

2.4.2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan meminta data statistik dari Badan Pusat Statistik kabupaten Jombang.

2.5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah hasil kuisioner terkumpul, kemudian terdapat beberapa tahap;

a. Editing Data

Editing data dilakukan dengan menilai kuisioner yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data cukup relevan untuk diproses lebih lanjut.

b. Coding

Coding merupakan pengklasifikasian jawaban para responden berdasarkan jenis jawabannya.

c. Tabulasi

Tabulasi merupakan memasukan data dalam tabel sehingga lebih mudah untuk dianalisis lebih lanjut.

2.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan langsung mendeskripsikan hasil tabulasi kuisioner dan kemudian di analisis pengaruh yang terjadi akibat pemekaran kecamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik

Pemekaran wilayah dapat mempengaruhi tingkat pelayanan publik pada daerah yang mengalami pemekaran. Perubahan pelayanan publik dapat diketahui berdasarkan persepsi masyarakat daerah yang dimekarkan tentang pelayanan publik. Berikut adalah tabel 3.1. hasil persepsi masyarakat tentang perubahan pelayanan publik setelah pemekaran.

Tabel 3.1. Persepsi Masyarakat Ngampel Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persepsi	Alur pelayanan publik		Pembuatan perizinan dan surat-surat		Kemudahan mengakses pelayanan publik	
	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun
SD	12	7	13	6	15	4
SMP	12	1	13	0	11	2
SMA	5	2	5	2	7	0
Lanjutan						
Persepsi	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan		Kualitas pelayanan kesehatan			
	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun		
SD	17	2	17	2		
SMP	13	0	13	0		
SMA	6	1	6	1		

Sumber : Survei Penelitian

Pemekaran wilayah memberikan pengaruh terhadap tingkat pelayanan publik yang ada di Kecamatan Ngusikan. Menurut masyarakat Desa Ngampel terdapat penurunan dan peningkatan tingkat pelayanan publik setelah terjadi pemekaran wilayah. Pengaruh pemekaran kecamatan dapat diketahui berdasarkan hasil persepsi masyarakat berdasarkan jenis mata pencaharian seperti tabel 4.1. Persepsi masyarakat mengenai pelayanan publik setelah pemekaran, menurut masyarakat yang bekerja sebagai petani mengalami peningkatan seperti pengurusan pembuatan akta kelahiran dan kartu tanda penduduk (KTP) itu menjadi lebih mudah karena akta kelahiran dan KTP sekarang bisa langsung diurus melalui kantor desa. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat atau sistem pemerintahan, seperti pembuatan KTP harus menunggu setidaknya 3 bulan setelah pembuatan KTP serta alur pelayanan pembuatan surat-surat tersebut juga tidak berbelit-belit, sama halnya dengan pembuatan kartu keluarga. Namun disamping itu, dengan pemekaran wilayah ini tempat pelayanan publik seperti kantor camat dan puskesmas lebih mudah di akses oleh masyarakat karena jaraknya yang tidak terlalu jauh seperti sebelumnya kantor camat dan puskesmas hanya ada di kecamatan induk yaitu Kecamatan Kudu. Pendapat tersebut juga sama halnya dengan masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta, pensiunan, dan Pegawai Negeri.

Tabel 3.2. Persepsi Masyarakat Mojodanu Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persepsi	Alur pelayanan publik		Pembuatan perizinan dan surat-surat		Kemudahan mengakses pelayanan publik	
	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun
SD	16	4	13	7	19	1
SMP	17	2	15	4	19	0
SMA	7	5	9	3	10	2
Sarjana	1	0	1	0	1	0
Lanjutan						
Persepsi	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan		Kualitas pelayanan kesehatan			
	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun		
SD	20	0	20	2		
SMP	17	2	17	2		
SMA	10	2	11	1		
Sarjana	1	0	1	0		

Sumber : Survei Lapangan

Persepsi masyarakat tentang pelayanan publik di kecamatan ini berdasarkan tingkat pendidikan dengan jumlah keseluruhan dari kedua desa yaitu Sekolah dasar dengan jumlah 39 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 32 orang lulusan SMP, Sekolah Menengah Atas (SMA) 19 orang, dan Sarjana dengan jumlah 1 orang. Berdasarkan kedua tabel juga dapat dilihat pelayanan kesehatan juga menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum pemekaran, dapat dilihat dengan cepat tanggapnya pekerja pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Puskemas Pembantu (Pustu), serta adanya bidan desa yang tersebar di setiap desa di Kecamatan Ngusikan terhadap masyarakat yang datang, dan dengan adanya kartu BPJS yang dimiliki oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan biaya yang akan dikeluarkan. Pada dasarnya berdasarkan tabel 4.1. dan tabel 4.2. masyarakat dari kedua desa menyatakan tingkat pelayanan publik menjadi lebih baik setelah pemekaran kecamatan.

3.2. Pengaruh Pemekaran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemekaran wilayah berdasarkan hasil penelitian memberikan pengaruh yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ngusikan. Pengaruh pemekaran kecamatan dapat diketahui berdasarkan persepsi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat. Menurut persepsi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan yaitu

petani yang berjumlah 65 orang dari jumlah responden, wiraswasta 14 orang, pensiunan 1 orang, dan pegawai negeri 1 orang seperti tabel dibawah ini

Tabel 3.3. Persepsi Masyarakat Ngampel Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persepsi	Tingkat Buta Huruf		Tingkat Kelulusan Sekolah		Tingkat Konsumsi Makanan Bergizi	
	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun
SD	1	18	15	4	18	1
SMP	0	13	13	0	12	1
SMA	0	7	7	0	7	0
Lanjutan						
Persepsi	Angka Kematian Bayi		Tingkat Pengeluaran			
	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun		
SD	4	15	14	5		
SMP	1	12	8	5		
SMA	7	0	4	3		

Sumber : Survei Lapangan

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar masyarakat Desa Ngampel menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran menjadi lebih meningkat jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah persepsi masyarakat tentang berkurangnya jumlah masyarakat yang mengalami buta huruf disebabkan karena sudah berjalannya program sekolah untuk para orang tua jompo atau lansia yang sebelumnya belum mengenyam pendidikan atau masyarakat yang putus sekolah dan adanya program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, kualitas pendidikan yang sudah mulai meningkat ditandai dengan tercukupinya fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang kondisinya lebih baik dari sebelumnya, terpenuhinya jumlah tenaga pengajar, dan meningkatnya jumlah kelulusan sekolah yang sebelumnya tidak sedikit anak-anak usia sekolah meninggalkan bangku sekolah atau putus sekolah dengan alasan untuk membantu orang tua bekerja disawah (wawancara dengan Mukid). Sama halnya dengan aspek yang lainnya, aspek kesehatan juga mengalami peningkatan seperti masyarakat mudah mendapatkan makanan bergizi, hal tersebut disebabkan karena sejak dulu selain menanam tanaman pangan masyarakat juga menanam sayur-sayuran di sawah dan dengan meningkatnya jumlah pedagang-pedagang kecil yang menjual bahan makanan sehari-hari selain sayur sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh menuju pasar yang terdapat di Desa Keboan dan Desa Ngusikan untuk mendapatkan bahan makanan. Hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat pengeluaran sehari-hari masyarakat meningkat, karena pendistribusian bahan-bahan makanan juga memerlukan biaya sehingga sampai ke tujuan. Tetapi, menurut masyarakat Selain itu, angka kematian

bayi, menurut masyarakat sangat jarang terjadi kematian bayi, setidaknya dalam 2 tahun ada 1 sampai 2 bayi yang meninggal dunia.

Tabel 3.4. Persepsi Masyarakat Mojodanu Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Persepsi	Tingkat Buta Huruf		Tingkat Kelulusan Sekolah		Tingkat Konsumsi Makanan Bergizi	
	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun	Meningkat	Menurun
SD	2	18	20	0	19	1
SMP	2	17	19	0	18	1
SMA	1	11	12	0	10	2
Sarjana	0	1	1	0	0	1
Lanjutan						
Persepsi	Angka Kematian Bayi		Tingkat Pengeluaran			
	Meningkat	Menurun	Menurun	Menurun		
SD	2	18	17	3		
SMP	1	18	15	4		
SMA	9	3	9	3		
Sarjana	0	1	0	1		

Sumber : Survei Lapangan

Persepsi tersebut juga sama dengan persepsi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Mojodanu yaitu tingkat pendidikan SD 20 orang, SMP 19 orang, SMA 12 orang, dan Sarjana 1 orang. Masyarakat beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan di daerah ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan tingkat buta huruf yang semakin menurun, tingkat kelulusan yang semakin meningkat, kemudian kemudahan masyarakat dalam mendapatkan makanan bergizi, dan menurunnya angka kematian bayi di daerah ini. Tingkat kesejahteraan masyarakat di kedua desa ini juga dapat dilihat dari harta benda yang mereka miliki. Masyarakat Kecamatan Ngusikan sebagian besar memiliki rumah dengan bahan dasar papan, akan tetapi setiap rumah minimal mempunyai 2 kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat di kecamatan ini juga sebagian besar memiliki perhiasan yang cukup untuk dijadikan investasi masa yang akan datang. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat mampu mengolah penghasilannya dengan baik, sehingga masyarakat yang memiliki mata pencaharian petani tidak akan kekurangan pada saat menunggu hasil panen berikutnya.

3.3. Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Perkembangan Desa

Kecamatan Ngusikan memiliki tanah yang cukup subur ditandai dengan luas lahan pertanian yang mencapai 66,78% dari luas wilayah. Hal tersebut menjadikan Kecamatan Ngusikan sebagai salah satu lumbung pangan Kabupaten Jombang khususnya tanaman padi.

Akibatnya, tingkat mobilitas penduduk Kecamatan Ngusikan menjadi rendah karena sebagian besar masyarakat bekerja di daerah itu sendiri, mengelola lahan sawah milik sendiri ataupun milik orang lain yang disebut dengan buruh tani.

Tahun	Desa Ngampel		Desa Mojodanu	
	Luas Panen Bersih (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Luas Panen Bersih (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
2010	65	61,00	36	60,00
2011	61	68,00	38	63,00
2012	50	65,00	18	62,78
2013	50	65,00	18	62,78
2014	65	63,23	26	61,92

Berdasarkan data rata-rata produksi padi di atas dapat disimpulkan bahwa luas panen bersih Desa Ngampel lebih luas jika dibandingkan dengan luas panen bersih Desa Mojodanu, akan tetapi produktifitas padi lebih tinggi di Desa Mojodanu jika dibandingkan dengan Desa Ngampel. Salah satu contoh pada tahun 2014 luas panen bersih Desa Ngampel yaitu 65 Ha dengan rata-rata produksi 63,23 Kw/Ha sedangkan Desa Mojodanu luas panen bersih yaitu 26 Ha dengan rata-rata produksi 61,92 Kw/Ha. Hasil produksi pertanian khususnya pertanian padi mampu mempercepat perkembangan Kecamatan Ngusikan karena kondisi sumberdaya alam yang mampu menjadi tumpuan kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil pertanian dengan jumlah yang banyak juga mendorong pemerintah untuk secepatnya memperbaiki kondisi infrastruktur yang ada di daerah otonomi baru, seperti memperbaiki kondisi jaringan jalan sehingga lebih mudah dalam distribusi hasil pertanian. Tabel 4.6. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Desa

INDIKATOR	Ngampel				Mojodanu			
	Meningkat		Menurun		Meningkat		Menurun	
Perkembangan Desa	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
a. Lapangan kerja	13	33,3	26	66,7	42	80,8	10	19,2
b. Sarana dan prasarana pelayanan publik	33	79,5	6	20,5	42	80,8	10	19,2
c. Ketersediaan air bersih meningkat	38	97,4	1	2,6	51	98,1	1	1,9

Sumber : Survei Lapangan

Perbedaan persepsi masyarakat Desa Ngampel dan Desa Mojodanu tidak terlalu jauh berbeda disebabkan karena kondisi masyarakat di kedua desa tidak terlalu berbeda. Dilihat dari segi adat istiadat, agama, dan kondisi masyarakat itu sendiri. Perbedaan persepsi

masyarakat Desa Ngampel dan Desa Mojodanu tentang perkembangan desa berdasarkan tabel 4.6. hanya terjadi pada jumlah lapangan kerja di Desa Ngampel cenderung menurun atau tetap setelah pemekaran dibuktikan dengan 66,7% responden di Desa Ngampel menyatakan jumlah lapangan kerja menjadi menurun atau tetap sedangkan di Desa Mojodanu 80,8% responden menyatakan jumlah lapangan kerja menjadi meningkat setelah pemekaran kecamatan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Desa Ngampel selain sebagai petani atau buruh tani memiliki metapencarian sebagai pegawai swasta yaitu menjadi pekerja industri baik di Desa Ngampel itu sendiri atau keluar daerah seperti Surabaya dan Kota Jombang. Bahkan sebagian besar masyarakat Desa Ngampel memiliki mata pencaharian sebagai pegawai swasta. Berbeda dengan Desa Mojodanu, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani, namun tidak sedikit juga yang menjadi pegawai swasta dan wiraswasta dengan membuka toko-toko atau industri kecil di daerah itu sendiri, sehingga jumlah wiraswasta di Desa Mojodanu lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah wiraswasta di Desa Ngampel.

Persepsi masyarakat Desa Ngampel dan Desa Mojodanu mengenai sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di masing-masing desa tersebut menjadi lebih baik setelah pemekaran kecamatan. Dibuktikan dengan 79,5% responden Desa Ngampel dan 80,8% responden Desa Mojodanu menyatakan sarana dan prasarana di masing-masing desa telah mengalami peningkatan setelah pemekaran kecamatan, karena setelah pemekaran kecamatan kondisi jalan serta infrastruktur pendukung lainnya juga sudah mengalami perbaikan, walaupun terdapat sedikit jaringan jalan yang masih mengalami kondisi rusak parah yaitu jalan menuju Desa Mojodanu, hal tersebut yang menyebabkan adanya pendapat bahwa sarana dan prasarana di masing-masing desa menjadi menurun atau belum ada perbaikan. Ketersediaan air bersih juga menjadi lebih meningkat setelah pemekaran kecamatan, berdasarkan persepsi masyarakat Desa Ngampel 97,4% menyatakan meningkat dan 98,1% responden Desa Mojodanu menyatakan ketersediaan air meningkat pula. Meningkatnya ketersediaan air di kedua desa disebabkan karena di Desa Ngampel dan Desa Ngusikan penggunaan sumur pompa menjadi lebih meningkat dari sebelum pemekaran. Berdasarkan produktivitas dan hasil persepsi masyarakat tentang perkembangan desa yang dilihat berdasarkan jumlah lapangan kerja, sarana dan prasarana, dan ketersediaan air bersih dapat disimpulkan bahwa desa-desa yang ada di Kecamatan Ngusikan menjadi lebih berkembang setelah pemekaran kecamatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Pemekaran kecamatan memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngusikan. Setelah terjadi pemekaran tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini menjadi lebih meningkat.
2. Pemekaran kecamatan memberikan pengaruh terhadap perkembangan desa di Kecamatan Ngusikan. Perkembangan desa mencakup tingkat produksi padi yang semakin meningkat akibat pengelolaan yang baik, keadaan infrastruktur yang menjadi lebih baik, serta dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja yang bertambah, serta air bersih yang semakin mudah didapatkan karena adanya air PAM.

4.2. Saran

1. Untuk mendukung tujuan utama pemekaran harus didukung dengan sarana infrastruktur yang lebih baik dan pengembangan masyarakat yang lebih baik pula.
2. Seharusnya pemerintah yang terkait melengkapi data sebelum dan sesudah pemekaran untuk dapat mengetahui perbedaan yang terjadi setelah pemekaran, sehingga bisa dijadikan evaluasi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pemekaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 2015. *Kecamatan Ngusikan Dalam Angka 2015*. Jombang
- Ibrahim, Jimmi Mohamad. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang : Dahara
- Prize Iksan, Khairul. 2012. *Konsep Persepsi*. Pamekasan
- Jeddawi, Murtir. 2009. *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*. Watampone: Total Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?* Jakarta : Salemba Empat
- Mubarokah, Nur Lailatul. _____. Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur. *Skripsi Sarjana*

- Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Prasojo, Eko, dkk. 2012. *Dampak dan Masalah-Masalah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonomi Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. *Implikasi Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Putra, Raja Darius. 2014. *Kebijakan Pemerintah pada Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*.
- Rahmanita, Siti Hani. 2009. Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Aktivitas Perusahaan. *Skripsi Sarjana Bogor : IPB*
- Saputra, Surya Dwi. 2013. Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten
- Pesawaran Setelah Pemekaran Wilayah. *Skripsi Sarjana Lampung*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Susanti. 2014. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan DI Kabupaten Lampung Utara*. Lampung Utara
- Tika, Moh. Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara Tjasyono,
- Bayong. 2004. *Klimatologi Edisi Kedua*. Bandung. Institut Teknologi Bandung
- Website**
- Bestari, Prayoga. _____. *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan* [online], dari <http://www.crayonpedia.org/mw/> [13 April 2016]
- Bestari, Prayoga. _____. *Sistem Pemerintahan Kabupaten Kota dan Propinsi*, [online], dari <http://www.crayonpedia.org/mw/>, [13 April 2016]
- Falsisme, Kumbang. 2015. *10 Konsep Esensial Geografi (Pengertian dan Contohnya)*, [online], dari <http://minijleg.blogspot.co.id>, [23 Mei 2016]
- Pemerintah Kabupaten Jombang. 2016. *Tentang Kecamatan Ngusikan*, [online], dari www.jombangkab.go.id [10 April 2016]
- Shena, Adnan, dkk. _____. *Konsep – Konsep Geografi*, [online], dari <http://docs.google.com>, [23 Mei 2016]
- Rahmanita, Siti Hani. 2009. *Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Aktivitas Perusahaan*. Bogor : IPB
- Tika, Moh. Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

